

TAJUK RENCANA

Mencari Tersangka Kebakaran Kejagung

PENYELIDIKAN kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) memasuki babak baru menyusul langkah kepolisian meningkatkan penanganan kasus tersebut pada tahap penyidikan. Setidaknya, 131 saksi telah diperiksa, baik dari petugas kebersihan, pegawai maupun jaksa di lingkungan Kejagung maupun petugas yang ikut memadamkan api serta orang-orang yang melakukan renovasi gedung Kejagung.

Peningkatan status penyidikan kasus kebakaran gedung Kejagung oleh Bareskrim Polri seolah menjawab spekulasi masyarakat yang selama ini tidak percaya bahwa peristiwa itu hanya sebagai musibah. Apalagi, berdasarkan temuan Puslabfor Polri ada indikasi tindak pidana, bisa karena unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Yang jelas, berdasar olah TKP, penyebab kebakaran bukan berasal dari hubungan arus pendek atau korsleting, melainkan ada open flame atau nyala api terbuka. Tak hanya itu, dalam penyelidikan juga ditemukan cairan hidro karbon yang mempercepat akselerasi kebakaran.

Dengan temuan Puslabfor yang mengarah pada tindak pidana, wajar bila kemudian muncul pertanyaan siapa yang membakar gedung Kejagung pada 22 Agustus lalu itu ? Pertanyaan siapa, tentu tidak hanya sebatas satu atau dua orang, tapi bisa lebih, yakni mereka yang menyuruh (aktor intelektual), yang melaksanakan, turut serta maupun memberi kesempatan hingga peristiwa pidana (pembakaran) terjadi. Pertanyaan lebih subsatansial lagi, apa kepentingannya bila gedung Kejagung terbakar ?

Logika paling sederhana dan mudah dipahami publik, pasti ada orang atau pihak yang diuntungkan dengan peristiwa terbakarnya gedung Kejagung itu. Apakah kepentingannya menyangkut

kasus atau penanganan perkara atau lainnya, itulah yang kini harus didalami kepolisian. Dalam konteks itu, kita bisa memahami bila petinggi Kejagung beberapa saat setelah terjadinya kebakaran membantah bila berkas-berkas penting penanganan perkara, termasuk perkara Djoko S Tjandra, terbakar atau hilang, karena masih ada salinan dokumennya.

Adanya indikasi tindak pidana dalam kasus terbakarnya gedung Kejagung itu memang tidak serta menjawab spekulasi sebagian kalangan yang menganggap ada upaya menghilangkan barang bukti kasus Djoko S Tjandra. Tapi juga bukan berarti menutup kemungkinan itu. Karenanya, kita setuju agar kasus ini diungkap secara tuntas dan transparan.

Kita mengapresiasi sikap Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mempersilakan masyarakat untuk memantau penanganan kasus ini, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Artinya, Kejagung juga harus siap bila dalam perkembangannya nanti masih ada pejabat di lingkungan lembaga penuntutan, selain jaksa Pinangki, yang terlibat dalam kasus tersebut, bila kasus kebakaran itu memang ada kaitan dengan kasus Djoko S Tjandra .

Hemat kita, tak ada yang perlu ditutup-tutupi dalam penanganan kasus kebakaran gedung Kejagung. Pun tak perlu ada yang disembunyikan bila ada orang-orang yang diuntungkan dalam peristiwa kebakaran tersebut. Karena proses ini sudah memasuki tahap penyidikan, kepolisian harus benar-benar menjaga jangan sampai ada barang bukti yang hilang. Tak hanya itu, saksi-saksi yang relevan dalam penanganan perkara ini harus mendapat perlindungan hukum yang memadai, kalau perlu dengan meminta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). □



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Belajar dari Rumah

KEBIJAKAN Belajar dari Rumah (BDR) yang diambil Kemendikbud sebagai upaya mencegah penyebaran wabah Covid-19 hampir memasuki bulan keempat. Dapat dipastikan bahwa semua satuan pendidikan di semua jenjang telah menerapkan kebijakan ini sebagai bentuk prioritas keselamatan peserta didik.

Di tengah pelaksanaan kebijakan BDR, kembali masyarakat dikejutkan dengan kejadian memilukan di kota Tangerang yakni meninggalnya seorang anak berusia 8 tahun di tangan ibunya karena susah mengikuti pelajaran secara online. Hal ini merupakan sekelumit potret betapa tidak mudah nya kebijakan BDR di tengah situasi sulit ini dilaksanakan. Ketentuan pemberatan hukuman sebesar 1/3 jika kekerasan dilakukan oleh orang terdekat pada UU No 35/2014 tentang perlindungan anak, masih belum mampu melindungi sebagian anak dalam melaksanakan kebijakan BDR.

Mendampingi anak BDR sangat tidak mudah, meskipun oleh orang tua sendiri yang telah paham dengan karakter dan kemampuan anaknya. Berbagai keterbatasan orang tua baik dalam kompetensi pedagogik, teknologi, materi belajar serta adanya hambatan jaringan, perangkat ataupun masalah lain menjadi kendala atas kebijakan BDR yang tidak dapat dipungkiri.

Salah satu alternatif agar BDR dapat berjalan efektif adalah tuntutan agar guru kreatif dalam menyajikan pembelajaran, sehingga mudah dimengerti dan anak tidak cepat bosan serta tetap produktif dengan pendampingan orang tua ataupun anggota keluarga lain. Selain itu guru juga dituntut piawai mengatur waktu pembelajaran, menyatukan persepsi dan konsentrasi anak meskipun dalam keadaan saling berjauhan.

Tidak sedikit anak yang menginginkan guru mengerti keadaannya dan menjadi teman curhat atas rasa jenuh, kesulitan memahami materi, keadaan rumah yang tidak kondusif, orang tua yang sedang sakit serta masalah lain yang dihadapi anak dalam menjalani BDR. Guru harus mampu berperan sebagai kawan, pemberi motivasi dan tempat bertanya atas segala hal tanpa batasan ruang dan waktu bagi anak.

Banyak dijumpai anak harus melaksanakan BDR tanpa pendamping karena semua orang tua dan anggota keluarga harus bekerja di luar rumah. Tidak jarang anak yang mengeluh karena kendala kuota, jaringan dan perangkat serta hambatan lain yang sulit dicari jalan keluarnya selain guru harus memaklumi dan menguatkan mental atas apa yang dihadapi anak. Dengan demikian, tuntutan agar guru mampu bertindak sebagai motivator, mediator, kolaborator dan komunikator tidak dapat ditawar lagi.

Kolaborasi antara anak, orang tua dan guru dapat diwujudkan melalui kreativitas guru dalam meramu materi, pemilihan metode yang tepat, pendekatan yang humanis, komunikasi yang intensif serta pemberian tugas yang dapat memstimulasi agar anak mau bertanya baik pada guru, orang tua maupun teman sekelas sehingga BDR menjadi lebih bermakna. Hal ini dapat meninggalkan pengalaman positif baik bagi anak maupun orang tua, bukan sekadar pemberian dan penyelesaian tugas semata. Jika sudah demikian, maka kenyamanan BDR dapat diwujudkan serta menghindarkan sebagian anak yang rentan atas kekerasan oleh orang terdekat di tengah keadaan sulit ini. □

Nurlaila Mahmudah,
Guru Matematika SMKN 3 Yoga.

Realitas Demokrasi Lokal

Nurlia Dian Paramita

mematkan *civil society organization* (CSO) sebagai media penghubung pemerintah ke masyarakat apabila jangkauan tetap muka dari individu ke individu tak bisa dicapai institusi negara.

Mada Sukmajati (2020) dalam *local politics, pilkada and the pandemic* mengatakan bahwa pandemi ini justru mampu memperlambat pemilihan sebagai objek katarsis bantuan sosial yang rawan politisasi.



KR-JOKO SANTOSO

Hal Ini menimbulkan selalu ada celah untuk melakukan kejahatan struktural mulai dari praktik korupsi, klientelism, nepotisme hingga dinasti politik. Komitmen menempatkan rakyat sebagai subjek utama pemerintahan hanya sekedar formalitas.

Pendidikan Politik

J Kristiadi (2019) mengungkapkan bahwa sumber keajaiban masyarakat Indonesia itu adalah daya pikul masyarakat yang bersedia menderita karena masih mempunyai harapan kehidupan baik pada masa datang. Dengan menimbang kondisi tersebut perlu untuk terus menguatkan pendidikan politik sebagai upaya mencerdaskan pemilih di tingkat lokal. Satgas Covid 19 di tingkat kecamatan pada masa

Polantas sebagai Etalase Polri

Soeharno Panca Atmaja

masyarakat dalam upaya melakukan perbaikan pelayanan, hal terpenting yang harus diperhatikan.

Sebagai urat nadi kehidupan lalu lintas menghadapi permasalahan sangat kompleks di tengah masyarakat. Dan harus kita pahami, masyarakat selalu menilai baik buruknya polisi dari perilaku polisi yang dilihatnya sehari-hari. Dan itu tercermin pada polantas yang setiap hari berada di lapangan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga apabila polantas berperilaku promoter di lapangan, dampaknya satuan kerja atau satker polisi yang lain akan merasakannya. Dengan kata lain diakui atau tidak, polantas merupakan cermin semua perilaku polisi dalam penilaian masyarakat luas.

Disinilah perlunya kita menghargai peran penting yang diemban polantas. Mengapa demikian? Meskipun berada di garda depan pelayanan masyarakat, namun selama ini polantas terkesan berada di wilayah ‘pinggiran’. Perannya tidak terlalu dianggap penting dibandingkan dengan kinerja polisi lainnya yang langsung berhubungan dengan kejahatan.

Harus kita sadari, saat ini perkembangan kondisi lalu lintas sudah berubah luar biasa. Institusi atau kelembagaan mestinya cepat berbenah. Perubahan Korps Lalu Lintas menjadi Badan Lalu Lintas sangatlah tepat. Karena reformasi menyeluruh di tubuh polantas sangat diperlukan.

Sejarah

Pada 15 Mei 1915 lahirlah organ lalu lintas yang disebut Voer Wesen, dan diperbaharui menjadi Verkeespolitie, yang artinya polisi lalu lintas. Namun peran polantas dikesampingkan pada era penjajahan Jepang. Tugasnya digantikan Kempetai

Setelah 10 tahun merdeka, tepatnya 22 September 1955, Kepala Jawatan Kepolisian Negara mengeluarkan Order No 20/XVI/ 1955 tanggal 22 September, tentang Pembentukan Seksi Lalu Lintas Jalan, di bawah Kepala Kepolisian Negara. Tanggal 22 September menjadi acuan dari ulang tahun berdirinya polantas di Republik Indonesia.

Merayakan 65 tahun dengan mengusung tema ‘Implementasi E-Policing pada Fungsi Lalu Lintas Menuju Indonesia Emas 2045’. Sebuah harapan yang semoga terwujud. Sehingga di tengah masyarakat tidak terdengar lagi ‘Polisi dibenci’, tetapi berbalik ‘Polisi dicintai’. □

***) H Soeharno Panca Atmaja SH,**
Tenaga Ahli Korlantas Polri

Pojok KR

LPSK siap lindungi saksi kebakaran gedung Kejagung.
-- Gayung pun bersambut.

Dijadwalkan jaksa Pinangki disidang besok pagi.
-- Diharapkan kunci pembuka temukan aktor intelektual.

Tak terjadi fenomena gunung es dalam kasus Covid-19
-- Tergantung ketepatan tracing dan alat uji swab.

Berabe

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gung Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutardi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono., Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’. Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga..Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%